

**Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi
Corona Virus Disease 19 di Kota Palembang****Tedy Dwi Fani¹, Mudasir², Atrika Iriani³**¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia*E-mail correspondence: dedetdf@gmail.com***ABSTRAK**

Dalam Proses Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja ditengah Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Kota Palembang, diperlukan tahapan/ proses implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja ditengah Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Kota Palembang. Masalah dalam penelitian Banyaknya hambatan yang muncul mulai dari proses pendaftaran kemudian ditambahnya banyak pendaftar bukan sasaran program serta beberapa pelatihan tidak bisa di selesaikan sehingga insentif tidak bisa dicairkan, perlu melibatkannya PemerintahKab/Kota melalui Dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja yang lebih mengetahui roadmap daerah tersebut Hasil penelitian dan temuan ebagai berikut : Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja dilihat dari : 1) Mudah Tidaknya Masalah Di kendalikan adalah Dalam pengetahuan dan sosialisasi tidak maksimal dikarenakan ada gap antara masyarakat yang mengenal teknologi dan tidak, adanya indikasi kurang tepat sasaran masih adanya temuan kategori bukan syarat utama penerima Kartu Prakerja serta ketergantungan penerima Kartu Prakerja pada insentifnya saja. 2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi; Pelaksana Kartu Prakerja mengacu pada pedoman Perpres No 76 Tahun 2020, konsep ini mengungkap bagaimana perubahan pada kompetensi. Penggunaan insentif dilakukan tidak sesuai. 3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi; Peserta maupun penerima Kartu Prakerja terbebani dengan harus memiliki minimal smartphone ataupun komputer untuk menunjang pelatihan secara daring dan jaringan yang cukup memadai. Menyikapi keberlangsungan implementasi program Kartu Prakerja masih terlihat hanya sebagai bantuan social.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Prakerja, Covid-19**ABSTRACT**

In the Process of Implementing the Pre-Employment Card Program Policy in the midst of the Corona Virus Disease 19 Pandemic In Palembang City, implementation stages/processes are required. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pre-Employment Card Program Policy in the midst of the Corona Virus Disease 19 Pandemic in the city of Palembang. Problems in research The number of obstacles that arise starting from the registration process and then adding many applicants who are not the target of the program and some training cannot be completed so that incentives cannot be disbursed, it is necessary to involve the District/City Government through the relevant Office, namely the Manpower Office, which is more aware of the regional roadmap Results The research and findings are as follows: Implementation of the Pre-Employment Card Program Policy is seen from: 1) Whether or not the problem is easy to control is that knowledge and socialization are not optimal because there is a gap between people who know technology and those who don't, there are indications that it is not right on target, there are still findings of non-required categories The main recipients of Pre-Employment Cards and the dependence of Pre-Employment Card recipients on incentives alone. 2) The ability of policies to structure the implementation process; Implementing the Prakerja Card refers to the guidelines of Perpres No. 76 of 2020, this concept reveals how the changes in competence. Inappropriate use of incentives. 3) Variables outside the policy that affect the implementation process; Participants and recipients of Pre-Employment Cards are burdened with having to have at least a smartphone or computer to support online training and an adequate network. Responding to the continued implementation of the Pre-Employment Card program, it is still seen only as social assistance.

Keywords: Policy Implementation, Pre-Employment Card, Covid-19

PENDAHULUAN

Seluruh WNI dengan usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang bekerja ataupun bersekolah dapat mendaftar program kartu prakerja dan mengikuti seleksi. Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan voucher pelatihan sebesar satu juta rupiah yang kemudian dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan insentif sebesar enam ratus lima puluh ribu rupiah per bulan setelah pelatihan selama empat bulan. Terakhir, portal pekerjaan juga akan tersedia untuk memfasilitasi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Para pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Adapun platform digital yang disiapkan pemerintah antara lain Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan Mau BelajarApa.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Kartu Prakerja tidak tepat digunakan. Sebab tak ada jaminan bahwa pekerja yang telah dilatih mendapatkan pekerjaan baru, apalagi ditengah kondisi ekonomi yang sedang terpukul. Senada dengan itu, Sofyan A. Latief selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi mengatakan bahwa “tidak ada jaminan

ada pekerjaan baru, ini hanya buang-buang uang saja karena

Pekerja yang masuk ke dalam penerima bantuan program Kartu Prakerja ini diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK akibat dampak penyebaran virus corona."Sebagian besar pekerja yang terkena PHK ini bekerja di sektor perdagangan, perhotelan, rumah makan, tempat hiburan dan sebagian di pabrik, ribuan pekerja itu berasal dari 300-400 perusahaan di kota Palembang. Selain pekerja formal yang terkena PHK dandirumahkan, pengajuan juga dilayangkan oleh pelaku UMKM dan pekerja

Banyak pendaftar bukan sasaran program, dari data yang telah masuk per September 2020 lebih dari 8 juta orang telah mendaftar, tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja unsur permasalahan kepentingan. salah satu peserta lulus program kartu prakerja berumur lebih dari 40 Tahun. Adapun permasalahan yang pertama sering terjadinya NIK tidak terdaftar

Hambatan lain dari program ini adalah mensyaratkan bagi setiap peserta atau anggota yang lolos seleksi harus bersedia dan siap untuk mengikuti program pelatihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Disisi lain saat pemilihan pelatihan Kartu Prakerja terdapat masalah dalam pembelian pelatihan

Penentuan mitra yang tidak baik, benturan kepentingan serta potensi memberi keuntungan sekelompok pihak bukan hal yang mudah, apalagi berhubungan dengan dana APBN sejumlah 5,6 triliun.Informasi dan sosialisasi program ini harus lebih

digalakkan lagi. Pemerintah harus dapat meluruskan bahwa program kartu prakerja bukan bertujuan untuk menggaji penganggur, melainkan insentif pelatihan. Harus ditekankan juga bahwa peserta juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dengan baik peserta juga harus diberikan edukasi dalam pemilihan latihan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi implementasi berikutnya diungkapkan *Daniel Mazmanian* dan *Paul Sabatier* (dalam Agustino, 2006:153), yang mendefinisikan Implementasi kebijakan adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Untuk mempermudah memahami teori *Daniel Mazmanian* dan *Paul A. Sabatier* (dalam Agustino, 2006:144), maka digambarkan melalui gambar di bawah ini :

Konsep Program kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau

mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

a. Definisi Kesejahteraan Sosial

Segel dan Bruzy (Astria Widyastuti, 2009:2-3) menyatakan, bahwa kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Ukuran kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator- seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya. Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut publikasi BPS, menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial budaya.

b. Definisi Program Kartu Prakerja

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Kartu Prakerja. Berdasarkan Perpres 76/2020, tujuan Program Kartu Prakerja adalah:

1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
3. Mengembangkan kewirausahaan.
4. Pendaftaran secara daring dan luring (Pendaftaran luring dilakukan apabila ada keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan kebijakan pusat).
5. Jenis Pelatihan daring dan luring (Di masa pandemi, hanya daring)
6. Besaran total manfaat Rp. 3,55 juta (Bantuan Pelatihan Rp. 1 juta, Insentif Pasca Pelatihan total Rp. 2,4 juta (Rp. 600 ribu x 4 bulan), Insentif Pasca Survei total Rp. 150 ribu (Rp. 50 ribu x 3 survei))

c. Untuk Siapa Penerima Program Kartu Prakerja

Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar.

METODE PENELITIAN

Perspektif Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

Definisi Operasional

Dalam menganalisa Implementasi Program Kartu Prakerja di

Tengah Pandemi Corona Virus Diseases 19 di Kota Palembang mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan *Daniel Mazmanian* dan *Paul Sabatier* (dalam Agustino, 2006:144). Peneliti menganggap teori dari kedua tokoh tersebut cocok untuk menilai dan menganalisa implementasi program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Corona Virus Diseases 19 di Kota Palembang. Setelah membahas model faktor yang mempengaruhi kebijakan dari *Daniel Mazmanian* dan *Sabatier*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan.

a. Tingkat kesulitan teknis dukungan teori dan teknologi

Kebijakan penerima Kartu Prakerja di seluruh Indonesia yang lalu dalam pelaksanaannya hampir dikatakan banyak menemui hambatan teknis sehingga tujuan-tujuan formal dari kebijakan tersebut sulit direalisasikan. Sementara itu kebijakan pengendalian/pelestarian lingkungan hidup berjalan tersendat-sendat karena kesukaran-kesukaran dalam memonitor secara teratur kadar pencemaran lingkungan, luasnya wilayah yang harus dicakup dalam program, masih rendahnya kesadaran para pelaku, relative mahal nya peralatan yang digunakan dan masih rendahnya pengetahuan teknis para pejabat di daerah mengenai masalah yang ditangani. Setiap program jelas akan menyangkut masalah biaya yang biasanya dikumpulkan dari wajib pajak serta dari kelompok-kelompok sasaran.

Biaya yang dipikul tidak sebanding dengan tindakan-tindakan perbaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi, maka dukungan politik terhadap program tersebut kemungkinan akan mengalami penurunan yang menimbulkan perubahan tujuan formalnya. Adanya teknologi yang canggih yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa telah tersedia sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

Berikut penjelasan mengenai teknis pendaftaran program Kartu Prakerja yang diketahui oleh informan yang mewakili semua stakeholders Pelaksana Kartu Prakerja. Pengetahuan apa saja tahap pendaftaran program Kartu Prakerja yang menjadi masalah oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

Berdasarkan wawancara, tingkat kesulitan teknis dukungan teori dan teknologi untuk masalah pendaftaran program Kartu Prakerja secara *online* masih ada kendala yang ditemukan apalagi peserta yang belum mengenal teknologi.

b. Keragaman perilaku kelompok sasaran

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus

diberikan kepada para pejabat lapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

Keragaman perilaku kelompok sasaran dari penerima manfaat program Kartu Prakerja masih belum tepat dikarenakan masih banyaknya penerima suami istri dan tidak pada usia produktif mengingat program ini adanya pelatihan untuk pencari kerja yang produktif.

c. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. Variabel dibawah ini mengungkapkan bahwa suatu permasalahan sosial pada umumnya akan lebih dapat dikendalikan apabila tersedia teori yang andal yang mampu menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku dan pemecahan masalah, persyaratan teknologinya dipenuhi, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut tidak mahal.

Berdasarkan uraian di atas mengenai teknis dan sasaran perilaku Program Kartu Prakerja yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana, hanya dilakukan melalui website saja. Sementara, sasaran yang dilakukan kepada Peserta Program Kartu

Prakerja, Staff Disnaker Kota Palembang itu tidak mengetahui karena kebijakan dari pusat semua. Untuk itu hal tersebut, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja harus mencari solusi apabila ada kendala dari NIK peserta maupun foto dari handphone peserta Kartu Prakerja.

2. Kemampuan Kebijakan Untuk Menstruktur Proses Implementasi.

Pada prinsipnya perintah eksekutif untuk dapat mensetrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berartidalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan

Tujuan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber-sumber bagi para aktor yang terlibat, baik yang ada didalam lembaga maupun yang ada diluar lembaga. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

Kamu bisa mendaftar Kartu Prakerja jika kamu adalah pencari kerja,pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk itu, kamu harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

b. Dipergunakannya teori kausal

Hubungan yang baik suatu teori kausal mensyaratkan bahwa hubungan-hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah disatu pihak, dan tercapainya tujuan- tujuan program dapat dipahami dengan jelas.

c. Ketepatan dan alokasi sumberdana

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun.

d. Keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana

Masalah koordinasi ini makin runyam jika menyangkut peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya seringkali amat tergantung pada pemerintah daerah. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah

kemampuannya untuk memadukan hirarky badan-badan pelaksana.

e. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan konsistensi tujuan, memperkecil hambatan, dan intensif yang memadahi bagi kepatuhan kelompok- kelompok sasaran, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Perekrutan pejabat pelaksana

Pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pembuat undang-undang/peraturan untuk menjamin bahwa para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Tanggungjawab untuk implemetasi dapat ditugaskan pada badan-badan yang orientasi kebijakannya sejalan dengan peraturan dan bersedia menempatkan program pada prioritas utama.

g. Keterbukaan terhadap pihak luar

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauhmana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi pendukung tujuan. Aktor-aktor diluar badan pelaksana yang mau dan mampu berpartisipasi untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.

Dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Palembang yaitu untuk meningkatkan kompetensi

pencari kerja. Sehingga diharapkan ketika dilaksanakannya Program Kartu Prakerja tersebut pencari kerja mampu meningkatkan kompetensi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Sementara, untuk jangka pendek Program Kartu Prakerja di Kota Palembang dapat memberikan bantuan uang tunai kepada pencari kerja yang diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran pencari kerja Sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang dipersyaratkan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku serta kesinambungan terhadap perbaikan kompetensi pencari kerja. Sehingga pada akhirnya dapat menambah kompetensi yang ada di Kota Palembang.

Setidaknya ada dua yang dilihat dari Program Kartu Prakerja dalam implementasinya, yaitu perubahan Kondisi Kompetensi dan Kondisi Pendidikan pada Peserta Kartu Prakerja. Perubahan yang dirasakan oleh Penerima Program Kartu Prakerja di Kota Palembang, belum bisa dilihat secara langsung oleh Pejabat Disnaker Kota Palembang. Menurutnya sulit melihat perubahan, dikarenakan dirinya belum memahami betul program tersebut dalam realisasinya.

Perubahan yang dirasakan para Peserta Kartu Prakerja, sepertiya membenarkan pernyataan Informan Pendamping Kartu Prakerja di atas. Informan Budi, misalnya salah satu Penerima Bantuan Kartu Prakerja di Palembang yang mensyukuri pemberian bantuan dari Program Kartu Prakerja. Karena ia menganggap jika tidak ada program Kartu Prakerja, dirinya tidak mampu menguasai

komputer, dan sekarang ia sudah merasa lega karena bisa menggunakan komputer.

Dengan adanya perbedaan komposisi penerima Kartu Prakerja, maka penerima harus masuk dari kategori tersebut. Berikut ini proses distribusi dana Program Kartu Prakerja kepada pencari kerja atau Peserta Penerima Kartu Prakerja yang diterangkan oleh informan penelitian. Seperti halnya dikatakan oleh informan Manajemen Pelaksana,

Penuturan yang diungkapkan oleh penerima Kartu Prakerja Rizki Ema. Menurutnya, proses pencairan dana Kartu Prakerja biasanya dilakukan di setiap Kota masing-masing. Dimana, penerima Kartu Prakerja harus memiliki e-wallet ataupun dompet digital. Kartu Prakerja. Adapaun penggunaannya digunakan oleh Penerima Kartu Prakerja, tidak diketahui secara pasti. Karena tidak dilakukan monitoring penggunaannya tersebut digunakan oleh Peserta Kartu Prakerja.

Kesimpulan yang dirangkum dari gambaran perubahan yang dirasakan oleh pencari kerja atau Peserta Program Kartu Prakerja setelah mereka mendapatkan program tersebut belum terlihat baik dirasakan manfaatnya, baik dari mendapatkan pelatihan maupun untuk peningkatan skill. Meski demikian, untuk jangka panjang Program Kartu Prakerja, yang diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku serta kesinambungan terhadap perbaikan kompetensi pencari kerja, belum bisa terlihat. Sehingga Program Kartu Prakerja yang bisa menambah secara penuh kompetensi

yang didapat dan belum bisa dilihat dengan nyata.

3. Variabel Diluar Kebijakan Yang Mempengaruhiproses Implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi- kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan. Pertama, perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi. Kalau pada waktu yang sama masih ada masalah lain yang harus ditanggulangi maka kemungkinan untuk memperoleh sumberdaya menjadi sulit. Kedua, keberhasilan implementasi mungkin akan lebih sulit dicapai mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi setempat. Perbedaan ini menimbulkan desakan-desakan untuk membuat aturan-aturan yang menarik dan yang memberikan keluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi tertentu pada satuan-satuan organisasi lokal. Artinya bahwa tercapainya tujuan tergantung kepada tingkat dukungan lokal terhadap peraturan tersebut. Ketiga, dukungan terhadap peraturan yang dimaksud melindungi lingkungan berkorelasi dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok sasaran dan kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

b. Dukungan publik

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena untuk dapat mencapai hasil implementasi kebijakan setiap program membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.

c. Sikap dan risorsis dan konstituen

Kelompok-kelompok masyarakat dapat mempegaruhi proses implementasi kebijakan baik yang sifatnya mendukung program maupun yang menentang program. Kelompok-kelompok masyarakat berinteraksi dengan variabel lain melalui sejumlah tertentu yaitu Pertama, keanggotaan sumber-sumber keuangan mereka cenderung berbeda-beda sesuai dengan dukungan publik bagi posisi mereka dan lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki oleh tujuan peraturan. Kedua, kelompok-kelompok masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusan badan-badan pelaksana melalui pemebrian komentar atas keputusan-keputusan yang bersangkutan dan melalui sumbangan mereka berupa sumber-sumber yang diberikan. Ketiga, kelompok-kelompok tersebut mungkin mampu mempengaruhi kebijakansecara tidak lansung yaitu melalui publikasi hasil penelitian yang kritis mengenai prestasi kerja badan tersebut atau melalui pengumpulan pendapat umum.

d. Dukungan pejabat yang lebih tinggi

Lembaga-lembaga atasan dari

badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama.

e. Komitmen dan kualitas

kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioitas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan ini peneliti membuat suatu simpulan, yakni sebaga berikut:

1. Mudah tidaknya masalah untuk dikendalikan pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Prakerja yang tengah dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 perlu segera dievaluasi. Karena kurangnya ketepatan program sebagai jaring pengaman sosial, terutama dalam hal mencapai tujuan awal yaitu peningkatan mutu serta *skill* masyarakat untuk menghadapi pasar tenaga kerja masa depan Indonesia, mitra memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam memilih penyedia jasa pelatihan, kurangnya validitas

data berkaitan tujuan program, pengawasan anggaran, koordinasi antar instansi terkait, serta payung hukum. Pelatihan yang diberikan dalam rangka menambah keterampilan tenaga kerja memang mempunyai sisi mutu penyediaan tenaga kerja. Namun, selama permintaan tenaga kerja tidak meningkat, masalah pengangguran akan terus melanda perekonomian, lapangan kerja tidak tercipta, terutama karena hal ini terjadi selama pandemi Covid-19.

2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi hadirnya Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 seolah dipaksakan pemerintah dalam memberdayakan pekerja terdampak PHK, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Padahal mereka yang terdampak, saat ini lebih membutuhkan dana riil sebagai bantuan sosial, bukan malah pelatihan (online). Kartu Prakerja tidak akan menyerap lapangan pekerjaan dan

menjawab persoalan utama pengangguran, sebab baik sektor formal maupun informal menjadi korban terdampak Covid-19. Ditambahnya peserta harus menyiapkan paket internet untuk mengakses website serta pelatihanPrakerja dapat menambah beban dari penerima itu sendiri.

3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kurangnya keterlibatan pihak Pemerintah Daerah maupun tokoh masyarakat serta tokoh pendidikan dalam hal vokasi Kartu Prakerja. di antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari masyarakat yang terdampak covid-19 tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari masyarakat umumnya, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas diperlukan sosialisasisecara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasarKebijakanPublik. Bandung : CV Alfabeta Bandung. 2006. PolitikdanKebijakanPublik. Bandung :Puslit KP2W LemlitUnpad.
- Bisnis Sumatera 2020. 1.600 Warga Palembang Ajukan Kartu Prakerja, MayoritasKorban PHK.Diaksespada7 Oktober 2021, dari <https://sumatra.bisnis.com/read/2020406/534/1223063/1.600-warga-palembang-ajukan-kartu-prakerja-mayoritas-korban-phk>
- Data Badan Pusat Statistik Kota Palembang Dalam Angkat 2020,

diakses Agustus2021

<http://palembangkota.bps.go.id/>

- Disnakertrans Sumatera Selatan 2020. Pendaftaran Kartu Prakerja 2020. Diakses pada 5 Agustus 2021, dari <http://disnakertrans.sumselfprov.go.id/2020/04/06/pendaftaran-kartu-pra-kerja-2020/>
- Dewanti, Ajeng Kusuma. 2012. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di KecamatanGedangsari Kabupaten Genungkidul, Skripsi, UniversitasNegeri Yogyakarta (UNY).
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: GajahMada

- University Press.
- InewsSumsel 2021. 25.554 Warga Palembang Daftar Kartu Prakerja. Diakses pada 5 Agustus 2021, dari <https://sumsel.inews.id/berita/25554-warga-palembang-daftar-kartu-prakerja>
- IDN Times Sumsel 2020. Pemkot Palembang Mulai Kumpulkan Data Calon Penerima Kartu Prakerja. Diakses pada 2 November 2021. Dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/pemkot-palembang-mulai-kumpulkan-data-calon-penerima-kartu-prakerja/4>
- JDIH Kota Palembang 2020. Surat Kaelan, H. 2012, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Yogyakarta: Paradigma.
- Kompas. (14 September 2020). Target 5,6Juta Peserta Kartu Prakerja Diharapkan Tercapai. Diakses pada tanggal 18 September 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/09/14/194000326/september-target-5-6-juta-peserta-kartu-prakerja-diharapkan-tercapai?page=all>.
- Kartu Prakerja. 2021. Cara Mendaftar Kartu Prakerja. Diakses pada 11 Maret 2021. prakerja.go.id.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- SRIPOKU.com 2020. Kartu Prakerja Edaran Tentang Pendaftaran Kartu Prakerja. Diakses pada 2 November 2021. Dari <https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=7134&view#fulltext>
- Jurnal Sumsel 2020. Beberapa Masalah dalam Program Kartu Prakerja, Berikut Beserta Solusinya. Diakses pada 5 November 2021. Dari <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-74904794/beberapa-masalah-dalam-program-kartu-prakerja-berikut-beserta-solusinya?page=4> Salah Sasaran, Pengusaha Hingga Pegawai Swasta Dapat Kartu Prakerja. Diakses pada 2 November 2021. Dari <https://palembang.tribunnews.com/2020/09/07/video-eksklusif-kartu-prakerja-salah-sasaran-pengusaha-hingga-pegawai-swasta-dapat-kartu-prakerja?page=2>
- Tempo 2020. KPK Temukan 5 Masalah dalam Kartu Prakerja, Apa Saja. Diakses pada 3 November 2021. Dari <https://nasional.tempo.co/read/1355142/kpk-temukan-5-masalah-dalam-kartu-prakerja-apa-saja/full&view=ok>
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.